RENJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

DRAFT

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2021

KATA PENGANTAR

DRAFT

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, Maret 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

NANANG SETIAWAN, SIP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-3
1.3. Maksud dan Tujuan I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan II-8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan II-10
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan II-14
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD II-17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja III-25
3.3. Program dan Kegiatan III-28

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2020 berpedoman,pada visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disebut RPJPD) Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2021-2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagaimana termaktub dalam RKPD Tahun 2022. Dengan kata lain Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 harus ada keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2025, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 didasarkan pada sinkronisasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (2021) dan tahun-tahun sebelumnya (2020) yang dilakukan pembahasan secara formal melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Forum SKPD) dengan melibatkan seluruh bidang yang ada dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik serta dari Stakeholders terkait. proses penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Perhubungan pada tahun sebelumnya.

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2022 ini mempedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (selanjutnya disebut KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (selanjutnya disebut PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagian telah diubah ke dua kalinya dengan Permendagri no. 21 tahun 2011
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan menjadi bagian dari penjabaran RKPD Kabupaten Gresik tahun 2022 sebagaimana telah dibahas bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang) Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai hasil Musrenbang tersebut akan menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022.
3. Sebagai pedoman evaluasi hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan tahun berjalan (2021) dan tahun-tahun sebelumnya (2020).
4. Mewujudkan kesinambungan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan , RKPD dan RPJMD Kabupaten Gresik.

Adapun alur proses penyusunan Renja SKPD sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renja

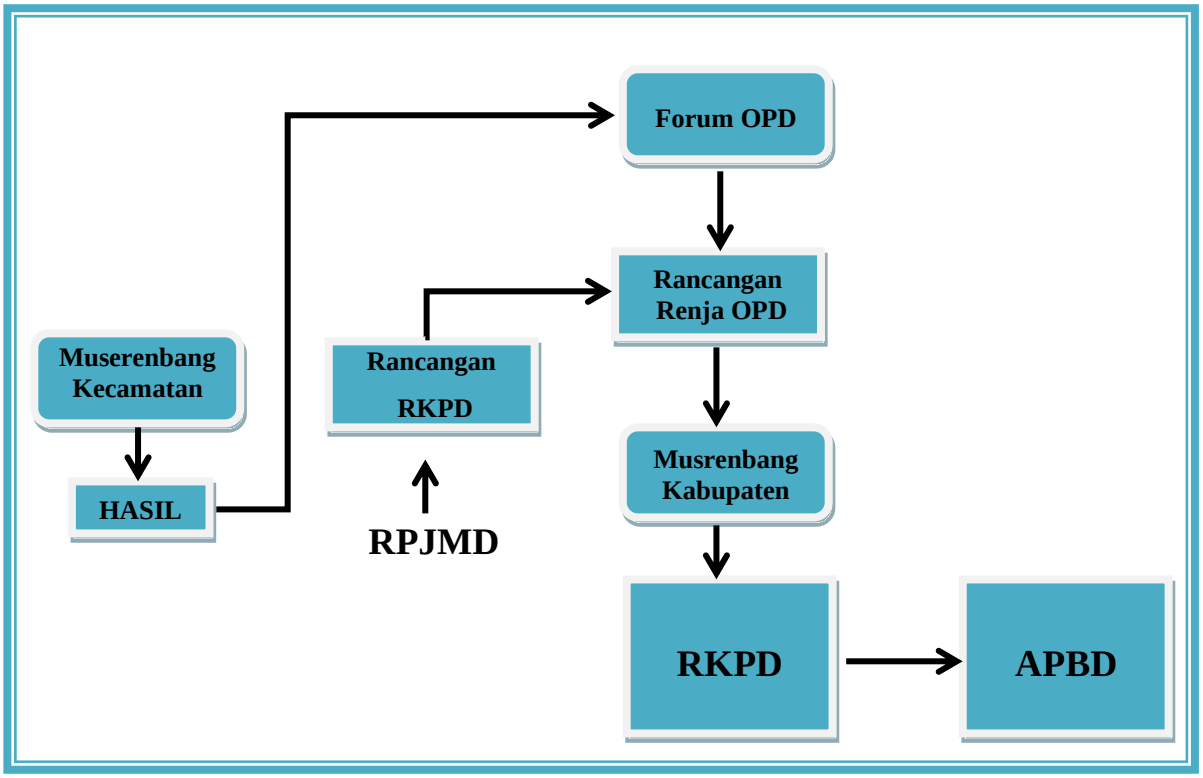

Sumber: diolah dari Permendagri No.54 Tahun 2010 Lampiran VI

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN Renja SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun lalu (2019-2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun terakhir dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2019-2020 dan realisasi tahun Awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2016-2017 mengacu pada hasil Laporan Evaluasi Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, dan realisasi APBD tahun berjalan (2021) untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Adapun secara rinci terkait dengan capaian target kinerja program dan kegiatan mengacu pada kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2020 dan tahun berjalan 2021 serta pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU (2020) KABUPATEN GRESIK

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (%)		Ket.
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	DINAS PERHUBUNGAN							**11.394.594.025,00**		**11.229.937.965,75**							
	PERENCANAAN							**11.394.594.025,00**		**11.229.937.965,75**							
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Tupoksi	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			**6.951.498.000,00**		**7.808.841.450,00**		**3.894.059.300,00**		**3.874.255.795,00**				**11.683.097.245,00**			
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli	8	1.072.598.000,00	4	1.037.782.150,00	2	208.938.400,00	2	200.842.150,00	100,00	96,13	6	1.238.624.300,00	75,00	115,48	Paket
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Surat Kabar dan Tabloid yang tersedia	22	85.400.000,00	12	63.700.000	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	100,00	100,00	24	73.700.000,00	109,09	86,30	Jenis
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu Kantor yang tersedia	60	575.000.000,00	36	448.087.500	11	120.386.000,00	11	120.386.000,00	100,00	100,00	47	568.473.500,00	78,33	98,86	Bulan
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas yang terlaksana	60	1.496.930.000,00	36	1.274.529.000	12	187.208.900,00	12	187.208.900,00	100,00	100,00	48	1.461.737.900,00	80,00	97,65	Bulan
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jumlah Tenaga Jasa Adminitrasi Kantor dan Pembantu Administrasi Kantor yang dibayar	108	1.354.505.000,00	79	1.519.354.800	28	737.550.000,00	28	737.550.000,00	100,00	100,00	107	2.256.904.800,00	99,07	166,62	Orang
	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jumlah Tenaga Operasional Kantor dan Tagihan Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	15	2.367.065.000,00	9	3.465.388.000	90	2.629.976.000,00	90	2.618.268.745,00	100,00	99,55	99	6.083.656.745,00	660,00	257,01	Jenis
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Tupoksi	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**			**13.571.814.300,00**		**10.233.837.000,00**		**1.562.895.000,00**		**1.551.435.987,35**				**11.785.272.987,35**			
	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	19	5.605.974.800,00	5	2.824.750.500	3	67.500.000,00	3	62.700.000,00	100,00	92,89	8	2.887.450.500,00	42,11	51,51	Unit
	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	94	4.137.475.000,00	56	3.009.898.750	10	538.755.000,00	10	534.595.200,00	100,00	99,23	66	3.544.493.950,00	0,00	85,67	Jenis
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	9	1.289.250.000,00	4	2.088.282.750	3	439.280.000,00	3	436.780.787,35	100,00	99,43	7	2.525.063.537,35	77,78	195,86	Unit
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	148	1.869.950.000,00	82	1.740.194.500	38	354.140.000,00	38	354.140.000,00	100,00	100,00	120	2.094.334.500,00	0,00	112,00	Unit
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara	71	669.164.500,00	44	570.710.500	15	163.220.000,00	15	163.220.000,00	100,00	100,00	59	733.930.500,00	83,10	109,68	Jenis
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Tupoksi	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**			**1.461.160.800,00**		**1.186.056.500,00**		**340.642.500,00**		**338.721.350,00**				**1.524.777.850,00**			
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Jumlah Karyawan / Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta atributnya	860	1.461.160.800,00	500	1.186.056.500	186	340.642.500,00	186	338.721.350,00	100,00	99,44	686	1.524.777.850,00	79,77	104,35	Orang

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (%)		Ket.
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Tupoksi	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**			**1.771.517.500,00**		**973.039.400,00**		**144.807.000,00**		**143.931.500,00**				**1.116.970.900,00**			
	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dinas yang disusun dan diselesaikan	20	381.675.000,00	12	247.481.600	3	26.820.000,00	2	26.645.000,00	66,67	99,35	14	274.126.600,00	70,00	71,82	Dokumen
	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Dinas yang disusun dan dihasilkan	25	325.000.000,00	13	208.713.000	12	26.820.000,00	12	26.820.000,00	100,00	100,00	25	235.533.000,00	0,00	72,47	Dokumen
	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	jumlah Dokumen Perencanaan Kerja yang disusun dan Dihasilkan	19	324.980.600,00	10	199.319.500	3	32.615.000,00	3	32.615.000,00	100,00	100,00	13	231.934.500,00	68,42	71,37	Dokumen
	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen IKM yang disusun	1	-	-	-	1	58.552.000,00	1	57.851.500,00	100,00	98,80	1	57.851.500,00	100,00	100,00	Dokumen
	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang tersedia	14	739.861.900,00	7	317.525.300	1	-	1	-	100,00	0,00	8	317.525.300,00	57,14	42,92	Sistem
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Tupoksi	**PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS SKPD**			**3.452.232.400,00**		**2.297.644.800,00**		**601.805.800,00**		**588.989.475,00**				**2.886.634.275,00**			
	OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL KOTA	Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan Terminal Kota yang difasilitasi	38	753.440.800,00	32	487.846.800	9	49.217.800,00	9	48.346.800,00	100,00	98,23	41	536.193.600,00	107,89	71,17	Orang
	OPERASIONAL DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Jumlah Petugas Operasional UPT Pengujian kendaraan Bermotor yang difasilitasi	27	1.776.250.000,00	9	1.374.001.000	16	491.213.000,00	16	480.832.675,00	100,00	97,89	25	1.854.833.675,00	0,00	104,42	Orang
	OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG BAWEAN	Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan Cabang Bawean yang difasilitasi	32	922.541.600,00	19	435.797.000	7	61.375.000,00	7	59.810.000,00	100,00	97,45	26	495.607.000,00	81,25	53,72	Orang
Tersedianya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai	**PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN**			**16.509.480.800,00**		**8.176.458.800,00**		**903.057.000,00**		**888.793.149,00**				**9.065.251.949,00**			
	PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL	Jumlah Halte dan Pos Pantau yang disediakan	27	2.301.900.000,00	11	1.082.166.000,00	4	295.291.000,00	4	292.775.449,00	100,00	99,15	15	1.374.941.449,00	55,56	59,73	Unit
	STUDY IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Jumlah Dokumen Kajian Identifikasi Pendataan dan Pembinaan Perbengkelan	1	-	0	-	1	7.382.000,00	1	3.478.000,00	100,00	47,11	1	3.478.000,00	100,00	100,00	Unit
	PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR	Jumlah Petugas Pengelolaan Parkir yang difasilitasi	121	14.207.580.800,00	74	7.094.292.800,00	300	480.944.000,00	300	476.286.700,00	100,00	99,03	374	7.570.579.500,00	309,09	53,29	Orang
	STUDY PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR	Jumlah Dokumen Study Pelayanan Parkir yang disusun	2	-	-	-	2	119.440.000,00	2	116.253.000,00	100,00	97,33	2	116.253.000,00	100,00	100,00	
Tersedianya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**			**6.125.760.000,00**		**4.296.960.700,00**		**712.953.125,00**		**694.556.019,00**				**4.991.516.719,00**			
	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	Jumlah Sarana dan prasarana Terminal/ Pelabuhan yang dipelihara	12	1.795.550.000,00	7	1.061.900.000,00	5	103.184.000,00	5	101.424.800,00	100,00	98,30	12	1.163.324.800,00	100,00	64,79	Tahapan Musrenbang
	REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN	Jumlah Halte Angkutan yang dipelihara	48	666.830.000,00	16	681.610.000,00	1	114.189.000,00	1	113.841.000,00	100,00	99,70	17	795.451.000,00	35,42	119,29	Jenis
	PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS	Jumlah APILL yang dipelihara	100	1.359.580.000,00	50	919.882.000,00	1	189.429.125,00	1	185.958.389,00	100,00	98,17	51	1.105.840.389,00	51,00	81,34	Jenis
	PEMELIHARAAN MARKA JALAN	Jumlah marka jalan yang dipelihara	6115	1.325.950.000,00	2792	945.714.900,00	1	82.445.000,00	1	72.385.600,00	100,00	87,80	2793	1.018.100.500,00	45,67	76,78	Jenis
	PEMELIHARAAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS	Jumlah rambu dan RPPJ yang dipelihara	579	977.850.000,00	324	687.853.800,00	170	223.706.000,00	170	220.946.230,00	100,00	98,77	494	908.800.030,00	85,32	92,94	Jenis

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (%)		Ket.
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**			**3.439.921.000,00**		**2.269.884.300,00**		**542.516.700,00**		**530.974.644,00**				**2.882.767.944,00**			
	PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	Jumlah Personil/Petugas yang Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya yang difasilitasi	53	1.864.000.000,00	31	1.319.589.300,00	17	369.171.700,00	53	366.677.009,00	311,76	99,32	84	1.686.266.309,00	158,49	90,46	Dokumen Kajian Analisis
	OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	Jumlah Petugas Pengawasan dan Pemantauan Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang difasilitasi	61	1.575.921.000,00	36	950.295.000,00	12	106.332.000,00	61	97.478.000,00	508,33	91,67	97	1.047.773.000,00	159,02	66,49	Dokumen Data dan Perencanaan
	PENGAWASAN KESELAMATAN LINTASAN KERETA API	Jumlah Petugas yang Melaksanakan Pengawasan di Perlintasan KA	20	200.000.000,00	-	81.909.000,00	6	67.013.000,00	6	66.819.635,00	100,00	99,71	6	148.728.635,00	30,00	74,36	
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**			**21.835.918.900,00**		**12.571.390.300,00**		**2.691.857.600,00**		**2.618.280.046,40**				**14.994.224.546,40**			
	OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS	Jumlah Petugas Operasional Penertiban Lalu Lintas yang difasilitasi	212	6.400.933.000,00	112	3.602.447.200,00	50	434.117.300,00	50	390.170.000,00	100,00	89,88	162	3.992.617.200,00	76,42	62,38	%
	SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN LALU LINTAS	Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas yang disusun	18	948.760.800,00	7	478.285.000,00	2	95.560.000,00	2	94.588.000,00	100,00	98,98	9	572.873.000,00	50,00	60,38	Orang
	SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA	Jumlah Dokumen Perhitungan Lalu Lintas Harian rata rata yang disusun	18	1.080.040.100,00	10	832.406.000,00	4	188.150.000,00	4	185.171.102,70	100,00	98,42	14	1.017.577.102,70	77,78	94,22	Buku
	PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS	Jumlah Peserta Pemilihan pelajar Pelopor Lalu Lintas	165	277.974.000,00	50	150.222.800,00	-	-	-	-	0,00	0,00	50	150.222.800,00	30,30	54,04	Buku
	PEMELIHARAAN ATCS	Jumlah ATCS yang dipelihara	13	590.000.000,00	3	192.030.500,00	1	97.796.500,00	1	96.549.200,00	100,00	98,72	4	288.579.700,00	30,77	48,91	Buku
	KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG	Jumlah Kajian Lalu Lintas Simpang Sebidang yang disusun	6	195.970.000,00	2	191.298.000,00	1	92.498.000,00	1	91.812.000,00	100,00	99,26	3	283.110.000,00	50,00	144,47	Buku
	KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN	Jumlah Kajian Blackspot/ Titik Rawan Laka yang disusun	10	481.241.000,00	3	277.140.800,00	3	134.249.800,00	3	132.478.398,90	100,00	98,68	6	409.619.198,90	60,00	85,12	Dokumen
	PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang tersedia	60	11.861.000.000,00	18	6.847.560.000,00	9	1.452.336.000,00	9	1.432.065.544,80	100,00	98,60	27	8.279.625.544,80	45,00	69,81	%

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (%)		Ket.
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PENGEMBANGAN SISTEM ATCS	ATCS yang Dikembangkan	1	197.150.000,00	1		1	197.150.000,00	1	195.445.800,00	100,00	99,14	2	195.445.800,00	200,00	99,14	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
   a. Subbidang Umum dan Kepegawaian.
   b. Subbidang Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
   a. Seksi Pengendalian Operasional.
   b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
   c. Seksi Manajemen Lalu Linta.
4. Bidang Angkutan, terdiri dari :
   a. Seksi Angkutan Darat.
   b. Seksi Pelayaran.
   c. Seksi Angkutan Udara dan Perkeretaapian.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
   a. Seksi Pemeliharaan.
   b. Seksi Pengembangan.
   c. Seksi Pengelolaan Parkir.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

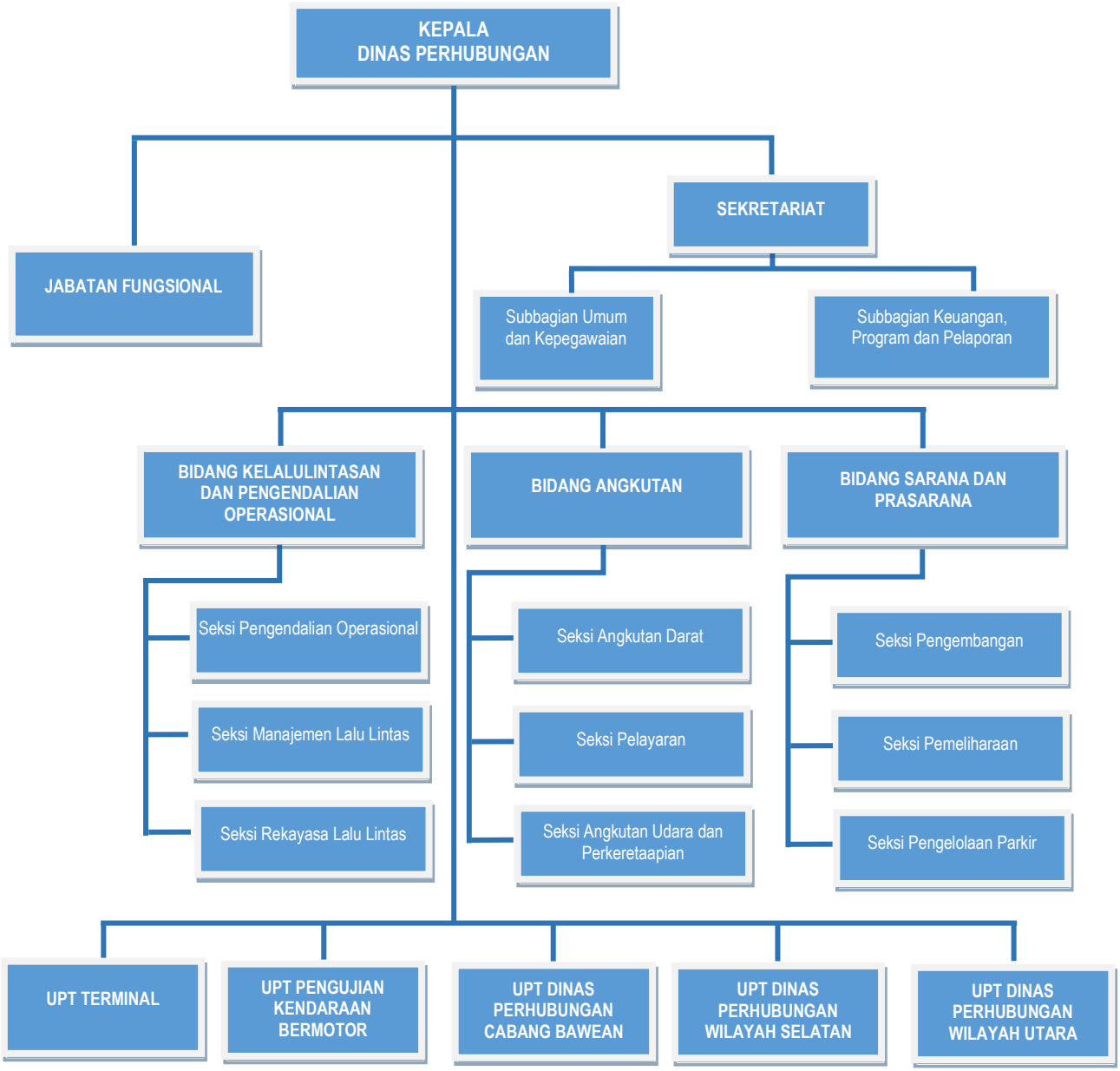

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik

A. Rincian Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

Tugas :

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Fungsi :

a. Penunjukkan lokasi penyelenggaraan terminal penumpang dan barang kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ;
b. Penunjukkan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
c. Penunjukkan lokasi tempat – tempat penyeberangan orang ;
d. Pengaturan tentang pembatasan pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor ;
e. Penunjukkan lokasi pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum di wilayah Kabupaten ;
f. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
g. Pemberian ijin pendirian perusahaan kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
h. Pemberian ijin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya ;
i. Pemberian ijin operasi angkutan jalan dan trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah Kabupaten ;
j. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat – alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur ;

k. Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu di wilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan Propinsi dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional ;
l. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan propinsi dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional ;
m. Penetapan kecepatan maksimal kendaraan bermotor pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan Kabupaten dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional ;
n. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu, prasarana lalu lintas serta tanda – tanda di jalan Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan jalan nasional dengan persetujuan Pemerintah, kecuali pembangunan dan peningkatan jalan ;
o. Penetapan pelabuhan kegiatan – kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di Kabupaten ;
p. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbunya dan bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk jalan dalam wilayah daerah Kabupaten ;
q. Penetapan dan pemberian ijin kursus mengemudi ;
r. Penetapan larangan penggunaan jalan, sungia/ danaudan atau perairan laut wilayah daerah Kabupaten ;
s. Sertifikasi laik pelayaran sungai dan Surat Tanda Kecepatan (STK) Nahkoda Pelayaran sungai, laut dan danau ;
t. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut dalam wilayah Kabupaten ;
u. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ;
v. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
w. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD ;

x. Pelaksanaan tugas – tugas dinas yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021, Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut :

3.3.1. Perumusan Kebijakan Operasional Retribusi Parkir

1) Isu dan Permasalahan

   Belum Optimalnya Kelancaran Proses dan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

2) Arah Kebijakan

   Semakin Lancarnya Proses dan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

3) Sasaran Kebijakan

   Tercapainya Efektifitas Proses dan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Perhubungan

a. Isu dan Permasalahan

Kurang Tersedianya dan belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

b. Arah Kebijakan

Tersedianya serta Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

c. Sasaran Kebijakan

Mencapai Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

B. Peningkatan Disiplin Aparatur di Dinas Perhubungan

a. Isu dan Permasalahan

Adanya Pegawai Dinas Perhubungan yang rendah disiplin dan Performa.

b. Arah Kebijakan

Meningkatkan Disiplin dan Performa Pegawai pada Dinas Perhubungan.

c. Sasaran Kebijakan

Tercapainya peningkatan Disiplin dan Performa Aparatur Dinas Perhubungan.

C. Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Perhubungan

a. Isu dan Permasalahan

Peningkatan Kapasitas SDM aparatur Dinas Perhubungan masih rendah.

b. Arah Kebijakan

Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Dinas Perhubungan.

c. Sasaran Kebijakan

Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Dinas Perhubungan

D. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimalnya Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan.

b. Arah Kebijakan.

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan

c. Sasaran Kebijakan.

Meningkatnya Hasil Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan.

E. Peningkatan Kualitas Layanan Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Perhubungan

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimalnya layanan Operasional UPT Di Dinas Perhubungan.

b. Arah Kebijakan.

Meningkatnya Kualitas layanan UPT di Dinas Perhubungan.

c. Sasaran Kebijakan.

Meningkatnya Hasil layanan UPT Di Dinas Perhubungan.

F. Peningkatan Sistem Prasarana Pengendalian Lalu Lintas

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimal dan kurang tersedianya Sistem Prasarana Pengendalian lalu Lintas.

b. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan dan meningkatkan Sistem Prasarana Pengendalian Lalu Lintas

c. Sasaran Kebijakan

Terwujudnya Kualitas Sistem Prasarna Pengendalian Lalu Lintas secara Optimal.

G. Peningkatan Mutu Layanan Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimal dan Tersedianya Perumusan Kebijakan Pelayanan Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkertaapian.

b. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan dan Merumuskan Kebijakan Pelayanan Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkertaapian.

c. Sasaran Kebijakan

Terwujudnya Perumusan Kebijakan Pelayanan Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkertaapian.

H. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Transportasi

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimal dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Transportasi.

b. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan dan meningkatkan Sarana Prasarana Pendukung Transportasi.

c. Sararan Kebijakan

Terwujudnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Transpoprtasi secara Optimal.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi, telaahan dan analisa yang mendalam, kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah serta kajian-kajian yang outputnya dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada pembahasan berikut disampaiakan tentang agenda pokok Nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah melalui sembilan program prioritas Pembangunan Nasional. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diantara sembilan program nawacita tersebut, yang sesuai dengan kondisi dan isu strategis di Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini telah dilaksanakan melalui Musrenbang Integrasi yang dilaksanakan Kabupaten Gresik dengan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk wilayah perkotaan dan Program Pendampingan Dana Desa untuk wilayah perdesaan serta dilanjutkan dengan Musrenbang Desa/Kelurahan yang didukung sistem apilikasi perencanaan melalui E-Planning. Semua ini sangat cocok dilaksanakan di Kabupaten Gresik, mengingat program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan yang umumnya berada didaerah pinggiran perlu untuk diprioritaskan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari Rencana kinerja Dinas Perhubungan diambil dari tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yaitu : "Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan dan ketepatan waktu".

3.2.2 Sasaran

1) Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai;
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum;
3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021,

Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut :

3.3.1. Perumusan Kebijakan Operasional Retribusi Parkir

1) Isu dan Permasalahan

   Belum Optimalnya Kelancaran Proses dan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

2) Arah Kebijakan

   Semakin Lancarnya Proses dan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

3) Sasaran Kebijakan

   Tercapainya Efektifitas Proses dan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

3.3.2. Study kelayakan Reaktivasi Jalur Kereta Api untuk system logistic Daerah - Nasional

1) Isu dan Permasalahan

   Beroperasinya Pelabuhan Internasional JIIPE sehingga dibutuhkan Angkutan yang bias menunjang Domestik - Nasional.

2) Arah Kebijakan

   Reaktivasi / pemfungsian kembali Jalur kereta Api yang pernah ada.

3) Sasaran Kebijakan

   Mencapai Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan Mekanisme Kinerja di Dinas Perhubungan.

3.3.3. Kajian penataan Parkir Off Street melalui fasilitas Park and Ride

1) Isu dan Permasalahan

   Berfungsinya Alon alon Gresik menjadi Islamic Center yang membutuhkan perhatian khusus penataan parkir.

2) Arah Kebijakan

   Pemberlakuan penutupan sebagian Jalan disekitar.Islamic Center pada hari hari tertentu disaat Lalu.

3) Sasaran Kebijakan

Tercapainya peningkatan Disiplin dan Performa Aparatur Dinas Perhubungan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2022 yang disusun melalui tahapan tahapan secara menyeluruh terdiri dari 4 Program 27 Kegiatan 68 Sub Kegiatan dan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022

Nomor Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
1						2	3	4	5	6	7	8
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
2	15					DINAS PERHUBUNGAN				40.456.531.228		
2	**15**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**		**13.922.608.130**		
2	**15**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**		**87.400.000**		**87.400.000**
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun *(dokumen)*	4	Kab. Gresik	54.150.000		54.150.000
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun *(dokumen)*	3	Kab. Gresik	14.250.000		14.250.000
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja yang tersusun *(dokumen)*	3	Kab. Gresik	19.000.000		19.000.000
2	**15**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6.647.318.130**		**6.647.318.130**
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan *(orang)*	57	Kab. Gresik	6.626.418.130	6.626.418.130	-
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun *(dokumen)*	1	Kab. Gresik	9.500.000		9.500.000
2	15	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun *(dokumen)*	12	Kab. Gresik	11.400.000		11.400.000
2	**15**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**363.375.000**		**363.375.000**
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas beserta atributnya *(orang)*	171	Kab. Gresik	285.000.000		285.000.000
2	15	01	2	05	09	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan yang disusun *(dokumen)*	2	Kab. Gresik	66.500.000		66.500.000
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat *(orang)*	5	Kab. Gresik	11.875.000		11.875.000
2	**15**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.096.775.000**		**1.096.775.000**

Nomor Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan *(unit)*	14	Kab. Gresik	85.500.000		85.500.000
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan *(unit)*	14	Kab. Gresik	213.750.000		213.750.000
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan *(unit)*	13	Kab. Gresik	82.650.000		82.650.000
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi terhadap kebutuhan Makanan Minuman Kantor *(bulan)*	12	Kab. Gresik	118.750.000		118.750.000
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi terhadap kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan *(bulan)*	12	Kab. Gresik	137.750.000		137.750.000
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi terhadap kebutuhan Bahan Bacaan / Surat Kabar *(bulan)*	12	Kab. Gresik	30.875.000		30.875.000
2	15	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi terhadap kebutuhan ATK Kantor *(bulan)*	12	Kab. Gresik	171.000.000		171.000.000
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi terhadap Kunjungan Tamu (bulan)	12	Kab. Gresik	66.500.000		66.500.000
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Rapat koordinasi *(bulan)*	12	Kab. Gresik	190.000.000		190.000.000
2	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kab. Gresik	0		0
2	**15**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**926.250.000**		**926.250.000**
2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kedaraan Dinas jabatan yang disediakan *(unit)*	1	Kab. Gresik	-		-
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kedaraan Dinas Operasional yang disediakan *(unit)*	1	Kab. Gresik	-		-
2	15	01	2	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah kedaraan operasional tak bermotor yang disediakan (unit)	10	Kab. Gresik	57.000.000		57.000.000
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler Kantor yang disediakan (unit)	19	Kab. Gresik	180.500.000		180.500.000
2	15	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	1	Kab. Gresik	380.000.000		380.000.000
2	15	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	14	Kab. Gresik	308.750.000		308.750.000
2	**15**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**4.022.490.000**		**4.022.490.000**
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitasi terhadap proses Surat menyurat kedinasan *(bulan)*	12	Kab. Gresik	3.990.000		3.990.000
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasi terhadap Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *(bulan)*	12	Kab. Gresik	427.500.000		427.500.000
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fasilitasi terhadap JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12	Kab. Gresik	171.000.000		171.000.000

Nomor Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN yang di kontrak *(orang)*	118	Kab. Gresik	3.420.000.000		3.420.000.000
2	**15**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**779.000.000**		**779.000.000**
2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara *(unit)*	10	Kab. Gresik	266.000.000		266.000.000
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional yang dipelihara *(unit)*	12	Kab. Gresik	142.500.000		142.500.000
2	15	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang dipelihara (jenis)	2	Kab. Gresik	38.000.000		38.000.000
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	1	Kab. Gresik	19.000.000		19.000.000
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara *(unit)*	1	Kab. Gresik	313.500.000		313.500.000
2	**15**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**25.026.002.527**		
2	**15**	**02**	**2**	**01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk yang ditetapkan**			**-**		**-**
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan (Masterplan) Perhubungan yang disusun *(dokumen)*	1	Kab. Gresik	-		-
2	**15**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan**			**16.124.775.177**		**16.124.775.177**
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang disediakan *(unit)*	31	Kab. Gresik	190.000.000,00		190.000.000
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang disediakan *(ruas jalan)*	142	Kab. Gresik	10.614.775.177,00		10.614.775.177
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang dipelihara *(unit)*	31	Kab. Gresik	142.500.000,00		142.500.000
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara *(ruas jalan)*	142	Kab. Gresik	5.177.500.000,00		5.177.500.000
2	**15**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Terminal Type C yang dikelola**	**4**		**1.062.100.000**		**1.062.100.000**
2	15	02	2	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Fasilitas Terminal yang dikembangkan	2	Kab. Gresik	399.000.000		399.000.000
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal yang dipelihara *(unit)*	4	Kab. Gresik	570.000.000		570.000.000

Nomor Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan operasional Terminal type c (bulan)	12	Kab. Gresik	93.100.000		93.100.000
2	**15**	**02**	**2**	**04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**3.135.000.000**		**3.135.000.000**
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir yang disediakan *(unit)*	2	Kab. Gresik	285.000.000		285.000.000
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Parkir *(bulan)*	12	Kab. Gresik	2.850.000.000		2.850.000.000
2	**15**	**02**	**2**	**05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Fasilitasi terhadap Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor**			**460.750.000**		**460.750.000**
2	**15**	**02**	**2**	**05**	**01**	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan	12	Kab. Gresik	-		-
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Smartcard Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan *(unit)*	4000	Kab. Gresik	95.000.000		95.000.000
2	15	02	2	**05**	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara *(unit)*	9	Kab. Gresik	247.000.000		247.000.000
2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian kendaraan Bermotor *(bulan)*	12	Kab. Gresik	118.750.000		118.750.000
2	**15**	**02**	**2**	**06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**			**2.710.552.350**		**2.710.552.350**
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang disusun *(dokumen)*	8	Kab. Gresik	332.500.000		332.500.000
2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang dipasang dan dipelihara *(jenis)*	9	Kab. Gresik	1.710.000.000		1.710.000.000
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang difasilitasi *(orang)*	50	Kab. Gresik	620.552.350		620.552.350
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Kegiatan Forum Lalu Lintas dan LLAJ	12	Kab. Gresik	47.500.000		47.500.000
2	**15**	**02**	**2**	**07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**180.500.000**		**180.500.000**
2	15	02	2	07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Peraturan terkait Andalalin yang ditetapkan		Kab. Gresik	85.500.000		85.500.000
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan(orang)	4	Kab. Gresik	38.000.000		38.000.000
2	**15**	**02**	**2**	**07**	**03**	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Fasilitasi terhadap pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	12	Kab. Gresik	57.000.000		57.000.000
2	**15**	**02**	**2**	**08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**				**236.075.000**		**236.075.000**

Nomor Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemudi yang Mengikuti Kegiatan Abdi Yasa Teladan *(orang)*	25	Kab. Gresik	51.300.000		51.300.000
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan Perusahaan	Jumlah Petugas Pemantauan Manajemen Keselamatan Angkutan yang difasilitasi *(orang)*	12	Kab. Gresik	184.775.000		184.775.000
2	**15**	**02**	**2**	**09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**209.000.000**	**-**	**209.000.000**
2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Kab. Gresik	209.000.000		209.000.000
2	**15**	**02**	**2**	**10**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota**				**188.100.000**		**188.100.000**
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Layanan Trayek Angkutan Umum Yang Tersusun (Dokumen)	2	Kab. Gresik	188.100.000		188.100.000
2	**15**	**02**	**2**	**11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**0**		**-**
2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Gresik	0		-
2	**15**	**02**	**2**	**12**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**73.150.000**		**73.150.000**
2	15	02	2	12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		1	Kab. Gresik	73.150.000		73.150.000
2	**15**	**02**	**2**	**16**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**646.000.000**		**646.000.000**
2	15	02	2	16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang yang difasilitasi (orang)	12	Kab. Gresik	646.000.000		646.000.000
2	**15**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				**1.179.220.571**		**1.179.220.571**
2	**15**	**03**	**2**	**03**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha**				**133.000.000**		**133.000.000**
2	15	03	2	03	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Operator Angkutan penyeberangan yang berizin *(Orang)*	1	Kab. Gresik	133.000.000		133.000.000
2	**15**	**03**	**2**	**06**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**				**157.700.000**		**157.700.000**

Nomor Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
2	15	03	2	06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang tersusun *(Aplikasi)*	2	Kab. Gresik	157.700.000		157.700.000
2	**15**	**03**	**2**	**07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**439.470.000**		**439.470.000**
2	15	03	2	07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Angkutan Penyeberangan Berbasis Aktual Data yang disusun *(Aplikasi)*	1	Kab. Gresik	68.970.000		68.970.000
2	15	03	2	07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Petugas Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan *(bulan)*	12	Kab. Gresik	370.500.000		370.500.000
2	**15**	**03**	**2**	**11**		**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**				**50.050.571**		**50.050.571**
2	15	03	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk yang tersusun *(Dokumen)*	1	Kab. Gresik	50.050.571		50.050.571
2	**15**	**03**	**2**	**12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**				**399.000.000**		**399.000.000**
2	15	03	2	12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah	1	Kab. Gresik	228.000.000		228.000.000
2	15	03	2	12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi terhadap Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal *(bulan)*	12	Kab. Gresik	171.000.000		171.000.000
2	**15**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**				**328.700.000**		**328.700.000**
2	15	5	1	1	1	Aksesibilitas lajur kereta api untuk sistem logistik barang Daerah				0		-
										0		-
2	**15**	**05**	**2**	**02**		**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**250.800.000**		**250.800.000**
2	15	05	2	02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Petugas Perlintasan KA yang Difasilitasi dan Jumlah Peserta FGD Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan KA yang tidak Berpalang Pintu *(orang)*	1	Kab. Gresik	178.600.000		178.600.000
2	15	05	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Kab. Gresik	72.200.000		72.200.000
2	**15**	**05**	**2**	**06**		**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota**				**77.900.000**		**77.900.000**
2	15	05	2	06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Jaringan Pelayanan KA yang dirumuskan	1	Kab. Gresik	77.900.000		77.900.000

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan Renja Kabupaten Gresik 2022 didasarkan pada hasil Forum SKPD yang dilanjutkan pada Musrenbang Kabupaten dan evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang selanjutnya menjadi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.
2. Ditetapkannya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022 disamping sebagai bahan penyusunan RKPD juga menjadi bahan penyusunan KUA-PPAS yang akan menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2022 sebelum ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2022;
3. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, maka semua pihak dan kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan harus menjadikan Renja Tahun 2021 ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021;
4. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKJiP) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2021;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang–bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di Dinas Perhubungan.